

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA
MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA SEBATIH
KECAMATAN SENGAH TEMILA
KABUPATEN LANDAK**

Oleh:

SARAH RIADI^{1*}

NIM: E1011131146

Sri Maryuni², Agus Eka²

*Email: sarahriadi@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Desa Sebatih. Penelitian ini menggunakan teori Purwanto dan Sulistyawati (2015) dengan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, subjek dipilih dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi Program Keluarga Harapan belum dapat dikatakan berhasil. Masih terdapat kekurangan dalam proses implementasi PKH di Desa Sebatih, terutama pada tahap penyaluran dan pemanfaatan dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga tahapan dalam proses implementasi, hanya tahap sosialisasi yang telah dilakukan sesuai aturan yang ada pada buku pedoman PKH. Sosialisasi adalah edukasi dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang PKH. Penyaluran dana adalah proses pemberian dana bantuan PKH kepada masyarakat, sedangkan pemanfaatan dana adalah penggunaan dana bantuan PKH oleh masyarakat sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu pada tahap penyaluran dan pemanfaatan dan masih perlu ditingkatkan. Penyaluran dana harus dilakukan tepat waktu dan pemanfaatan dana bantuan harus sesuai dengan tujuan dari Program keluarga Harapan. Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses implementasi PKH di Desa Sebatih harus dilakukan pengawasan terutama pada tahap penyaluran dana dan pendampingan bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan sehingga dana yang diterima benar-benar dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan tujuan PKH.

Kata kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan

**IMPLEMENTATION OF PROGRAM KELUARGA HARAPAN IN EFFORTS TO
OVERCOME POVERTY IN SEBATIH VILLAGE
SENGAH TEMILA DISTRICT
LANDAK REGENCY**

By:

SARAH RIADI^{1*}

NIM: E1011131146

Sri Maryuni², Agus Eka²

*Email: sarahriadi@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences Tanjungpura University
2. Lecturer of Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences Tanjungpura University

ABSTRACT

This study aimed to describe and analyze the implementation of program Keluarga Harapan in an effort to alleviate poverty in Sebatih Village. This research uses the theory of Purwanto and Sulistyawati (2015) with qualitative methods and descriptive research. In this study, subjects were selected using purposive sampling technique. Based on the research results, it was known that the implementation of Program Keluarga Harapan has not been successful. There are still deficiencies in the PKH implementation process in Sebatih Village, especially in the stages of fund distribution and utilization. The results showed that of the three stages in the implementation process, only the socialization stage had been carried out according to the rules in the PKH guidebook. Meanwhile it is at the distribution and utilization stage and still needs to be improved. The distribution of funds must be made on time and the use of aid funds must be in accordance with the objectives of the Harapan family program. To improve and improve the PKH implementation process in Sebatih Village, supervision must be carried out, especially at the stage of fund distribution and assistance to communities who receive assistance so that the funds received are actually used properly in accordance with PKH objectives.

Keywords: Implementation, Program Keluarga Harapan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan, isinya menimbang: a. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat; b. bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan diperlukan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat; c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penanggulangan kemiskinan.

Sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak nomor 4 tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan, pemerintah Indonesia melalui menteri sosial telah membuat program khusus untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, yaitu Program Keluarga Harapan. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH memberikan akses kepada keluarga miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan dan layanan pendidikan yang tersedia di daerah mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara

berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Kebijakan pemerintah tentang PKH sudah sangat tepat mengingat jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat tinggi. Tercatat pada bulan Maret 2016 jumlah penduduk miskin masih sebesar 10,86% dari total penduduk Indonesia atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, dari tahun pertama dilaksanakannya PKH yaitu pada tahun 2007 hingga tahun 2018 tahun lalu, PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%. Secara keseluruhan, kebijakan PKH memang

memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin di Indonesia. Namun implementasi PKH di tingkat daerah masih perlu dikaji dan diperbaiki.

Menurut Purwanto dan Sulistyawati (2015: 72) bahwa proses implementasi kebijakan berangkat dari adanya suatu kebijakan atau program. Untuk mencapai tujuannya maka kebijakan tersebut membutuhkan masukan-masukan kebijakan (*policy input*). Masukan dapat berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebijakan yang dirancang oleh pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai berbagai kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. I tersebut kemudian akan diolah menjadi keluaran kebijakan (*policy output*) yang dapat berupa pelayanan gratis yang diberikan oleh pemerintah misalnya: pendidikan, kesehatan dan air bersih

Berdasarkan keterangan masyarakat di Desa Sebatih, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) belum bisa dikatakan berhasil. Menurut masyarakat setempat, penetapan keluarga

penerima bantuan masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Beberapa keluarga penerima bantuan dianggap tidak layak mendapatkan bantuan. Di sisi lain, terdapat masyarakat dengan ekonomi rendah yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak diberikan bantuan oleh pejabat setempat. Selain penetapan keluarga penerima bantuan yang belum tepat, masalah lain yang ditemukan adalah jumlah bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada Perda Kabupaten Landak nomor 4 tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan. Desa Sebatih adalah salah satu desa di kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Desa ini terdiri dari tujuh dusun, yaitu Dusun Sebatih, Dusun Tolong, Dusun Kepayang, Dusun Keranji Birah, Dusun Nilas, Dusun Pau'pat, dan Dusun Ipaan.

Di Desa Sebatih, jumlah keluarga kurang mampu masih cukup tinggi. Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari data keluarga kurang mampu di Desa Sebatih, diketahui keluarga miskin berjumlah 367 KK.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya implementasi kebijakan PKH di Desa Sebatih, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.
2. Penetapan penerima bantuan PKH yang tidak tepat sasaran
3. Jumlah bantuan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah.

3. Fokus Penelitian

penelitian ini berfokus pada proses implementasi Program Keluarga Harapan Desa Sebatih, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi permasalahan dan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa implementasi Program Keluarga Harapan (PHK) dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Desa Sebatih belum maksimal?

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Desa Sebatih.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan-pembahasan mengenai kebijakan publik khususnya tentang peraturan daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat serta sebagai bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan yang positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Landak terkait pengambilan keputusan yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Daerah khususnya dalam menanggulangi kemiskinan. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pihak Dinas Sosial Kabupaten Landak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah dan program-program untuk menanggulangi kemiskinan.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan penjabaran dari suatu keputusan untuk dituangkan kedalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran. Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan kebijakan. Udoji (dalam Wahab (2004; 59), mengatakan bahwa “*the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented*” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan). Pendapat lain yang dikemukakan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2015; 21) Implementasi yaitu “kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan”. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala hasil kebijakan (*policy output*) dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

b. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya akan disingkat PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfers* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil) (Kementerian Sosial, 2019).

c. Kemiskinan

Kemiskinan adalah fenomena sosial struktural yang berdampak krusial terhadap keberhasilan pembangunan (Indeks Pembangunan Manusia) dan memiliki dampak yang sangat nyata dimasyarakat, seperti rumah tangga sangat miskin baik dari kemampuan ekonomi, pemenuhan kebutuhan pendidikan sampai pada

pemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi, yang mengakibatkan rendahnya sumber daya manusia (KBBI, 2014: 581).

Tanggung jawab kemiskinan bukan hanya menjadi tanggungjawab satu kementerian, sektor atau bidang tertentu sehingga pemerintah membuat kebijakan dan program yang proporsional. Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, pemerintah mempunyai banyak program yang bermuara kepada masyarakat miskin dengan membuka akses atau peningkatan jangkauan masyarakat tidak mampu/miskin terhadap pelayanan publik kesehatan dan pendidikan, atau yang lebih dikenal dengan Program Keluarga Harapan yang ditujukan untuk keluarga miskin yang berfokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya bidang pendidikan dan Kesehatan (Suyanto, 2013: 25).

Misi Program Keluarga Harapan mengupayakan perubahan perilaku dan pola pikir keluarga peserta terhadap kesehatan anak dan ibu hamil serta tingkat pendidikan anak-anak rumah tangga sangat miskin. Kebijakan dan misi yang baik ada kalanya tidak sesuai dengan cita-cita atau harapan yang akan dicapai kadang justru memiskinkan masyarakat secara struktural,

hal demikian dapat terjadi pada kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran, seperti yang dapat terungkap bahwa ada kecenderungan masyarakat miskin yang mendapat bantuan tunai untuk pendidikan anak justru dipergunakan untuk konsumsi kebutuhan hidup sehari-hari, hal ini dikarenakan Program penanggulangan kemiskinan perlu penanganan yang komprehensif terpadu, sinergi dan berkelanjutan (Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan, 2013: 10).

d. Faktor Penyebab Kemiskinan

Adapun faktor kemiskinan menurut Kuncoro dilihat dari sisi ekonomi disebabkan tiga hal, yakni sebagai berikut:

- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah;
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.

- c. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal

Ketiga penyebab kemiskinan tersebut di atas bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketertinggalan, ketidak-sempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas dapat mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir yang dikemukakan Nurse yang dikutip oleh Kuncoro mengemukakan, bahwa negara miskin itu karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*).

e. Dampak-dampak Kemiskinan

Dari sekian faktor penyebab yang telah dipaparkan, memunculkan suatu permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Dari suatu permasalahan sosial saja yakni kemiskinan dapat memunculkan permasalahan-permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan memberikan dampak

sosial yang beraneka ragam mulai dari tindak kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu, dan masih banyak lagi. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh banyak pihak, tindakan-tindakan kriminal yang marak terjadi kebanyakan dilatarbelakangi oleh motif ekonomi yakni ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

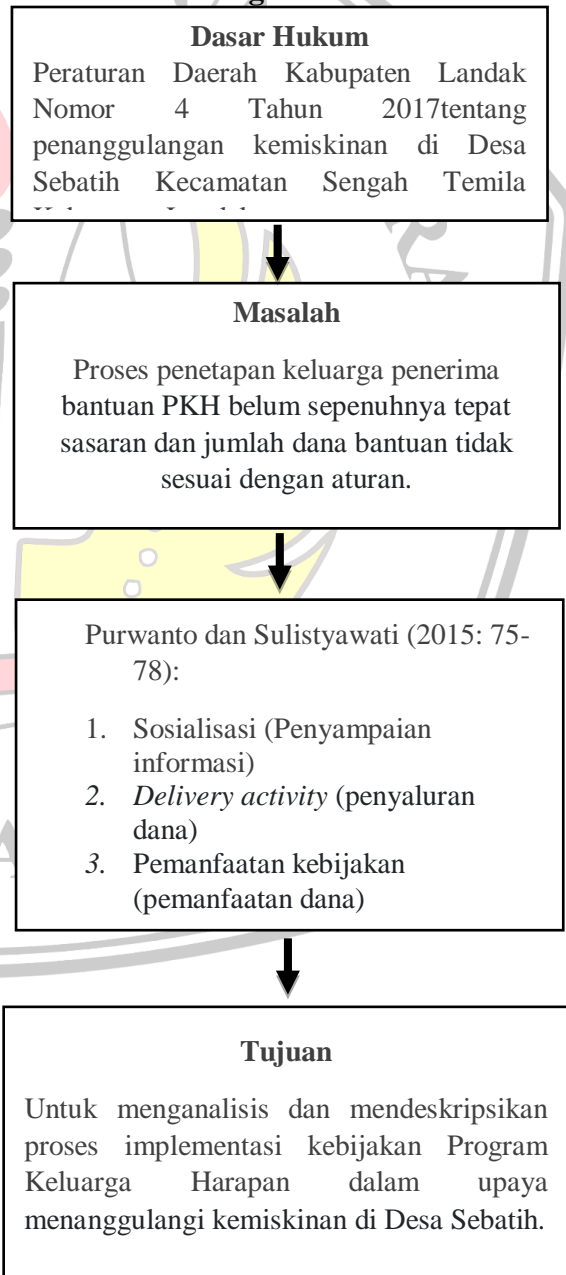
Selain maraknya tindak kriminal, kondisi kesehatan masyarakat yang buruk juga merupakan salah satu dampak dari adanya kemiskinan. Berikut rincian dampak yang terjadi akibat kemiskinan:

- a. Banyaknya pengangguran;
- b. Terciptanya perilaku kekerasan, ketika seseorang tidak lagi mampu mencari penghasilan melalui jalan yang benar dan halal dan mereka merasa tidak sanggup lagi bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan;
- c. Banyaknya anak yang tidak mengenyam pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi membuat masyarakat miskin tidak lagi mampu menjangkau dunia sekolah atau pendidikan;

Sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Biaya pengobatan yang tinggi membuat masyarakat miskin memutuskan untuk tidak berobat. Sehingga, mereka sama sekali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak (Mubyarto, 1999: 20).

2. Alur Pikir Penelitian

Kerangka Teori



C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif (Moleong, 2010).

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif. Menurut Whitney (dalam Mustamin, 2009) berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpersi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu. Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan penelitian kualitatif yang memaparkan situasi, kondisi dan kejadian tentang implementasi program keluarga harapan Desa Sebatih,

Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak pada bulan Maret 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Ketua UPPKH di Desa Sebatih sebagai informan kunci (1 orang)
2. Para Peserta PKH atau RTSM sebagai informan kunci (4 orang).

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi PKH di Desa Sebatih, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi.

Adapun alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan alat dokumentasi.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum

kata-kata yang penting, kemudian penyajian data (*data display*) dilakukan dengan kalimat yang singkat atau uraian yang singkat, dan yang terakhir verifikasi data (*conclusion drawing/ verification*) dengan menarik kesimpulan dari masing-masing data yang ada (Hasan, 2002).

D. HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti secara khusus membahas tiga tahapan dalam implementasi suatu program di Desa Sebatih. Ketiga aspek tersebut menurut Purwanto dan Sulistyowati (2015) adalah sosialisasi, *delivery activities* (penyaluran dana) dan pemanfaatan dana.

Untuk mendapatkan informasi yang valid tentang implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Sebatih, peneliti melakukan wawancara dengan ketua PKH Desa Sebatih, selain itu untuk mengkonfirmasi pernyataan ketua PKH peneliti juga mewawancarai warga penerima bantuan PKH sebanyak empat orang.

1. Proses Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PKH Desa Sebatih yakni Bu Mega menjelaskan bahwa telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat anggota RTSM PKH di Desa Sebatih. Adapun

sosialisasi tersebut bertujuan untuk menjelaskan Program keluarga harapan itu sendiri, mulai dari latar belakang, tujuan hingga manfaatnya bagi masyarakat. Harapannya bahwa masyarakat dapat bekerjasama untuk mewujudkan dan bersama-sama dengan pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat untuk dapat merealisasikan dan mewujudkan tujuan dari Program Keluarga Harapan.

Selain mewawancarai Ketua PKH peneliti juga mewawancarai masyarakat anggota RTSM PKH untuk mengkonfirmasi keterangan dari Ketua PKH. Berdasarkan keterangan empat warga anggota RTSM PKH yang diwawancarai, sosialisasi PKH di Desa Sebatih telah dilakukan. Mereka menyatakan bahwa telah mengikuti sosialisasi PKH yang dilaksanakan di rumah Ketua PKH Desa Sebatih.

Berdasarkan buku pedoman PKH tahun 2019, Fokus sosialisasi PKH tidak hanya pada aspek implementasi dan keberhasilan pelaksanaan program PKH, tetapi juga pada *monitoring* pengaduan aspek pengembangan kebijakan, khususnya dalam membangun dukungan dan komitmen untuk melembagakan PKH dalam bentuk Sistem Jaminan Sosial.

Secara garis besar, sasaran sosialisasi PKH adalah pelaksana PKH, KPM PKH, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat umum dengan materi yang berisi muatan informasi tentang mekanisme dan alur pelaksanaan PKH, hasil kajian dan evaluasi tentang PKH, berbagai kebijakan pelaksanaan PKH.

2. Proses Penyaluran Dana

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan berdasarkan penetapan KPM PKH yang memiliki komponen kepesertaan (*eligible*), memenuhi kewajiban berdasarkan kriteria komponen PKH dan mengikuti pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PKH Desa Sebatih yang menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa proses penyaluran dana dilakukan melalui agen yang bekerjasama dengan bank. Setiap kali pencairan dana maka masyarakat yang menerima bantuan akan menarik atau mengambil dana bantuan melalui agen tersebut yang dalam program PKH ini terdapat 4 kali pencairan dalam waktu satu tahun. Lebih jauh lagi, Ia menjelaskan bahwa pendamping PKH, Dinas Sosial dan Bank sebagai mitra kerja

bertanggung jawab terhadap proses penyaluran dana tersebut. Jumlah dana yang diberikan kepada warga penerima bantuan bervariasi. Khusus untuk ibu hamil dana yang diberikan berjumlah Rp. 600.000,00, balita berjumlah Rp. 600.000,00, untuk anak SD berjumlah Rp. 225.000,00, untuk SMP berjumlah Rp. 375.000,00, untuk SMA berjumlah Rp. 500.000,00 dan lansia berjumlah Rp. 600.000,00.

Keterangan dari Ketua PKH tersebut kemudian dikonfirmasi oleh hasil wawancara dengan masyarakat anggota KPM PKH Desa Sebatih. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, empat narasumber menyatakan telah menerima dana bantuan secara bertahap sebanyak empat kali yang diberikan langsung oleh Ketua PKH Desa Sebatih. Berdasarkan hasil wawancara, Bu Mulian menjelaskan bahwa Ia menerima bantuan berupa uang tunai dan barang berupa beras dan telur yang diberikan oleh Ibu Mega selaku Ketua PKH Desa Sebatih. Sementara itu, jumlah dana yang diterima oleh Bu Mulian berkisar antara delapan ratus hingga Sembilan ratus ribu rupiah. Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan Ibu Mulian sebagai salah satu warga penerima

bantuan PKH menjelaskan bahwa dana bantuan digunakan untuk biaya anak sekolah. Lebih jauh lagi Bu Mulian mengatakan merasa sangat terbantu dengan adanya program ini.

Selain Bu Mulian, narasumber berikutnya adalah Ibu Malina. Ia menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan berupa uang tunai dan beras diberikan oleh Bu Mega selaku ketua PKH Desa Sebatih. Sementara itu Ketika ditanyakan mengenai jumlah dana yang diberikan, Bu Malina mengatakan bahwa Ia mendapatkan bantuan uang tunai sebesar tiga ratus hingga tujuh ratus ribu. Berkaitan dengan pemanfaatan dana bantuan, Ibu Malina mengatakan bahwa dana yang diberikan digunakan untuk keperluan sekolah anaknya dan Ia merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

Narasumber berikutnya adalah Ibu Sabinah. Terkait dengan penyaluran dana bantuan PKH, Ibu Sabinah menjelaskan bahwa jenis bantuan yang ia terima berupa uang tunai yang diberikan oleh Ibu Rigas Mega selaku ketua PKH dengan jumlah uang delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah. Terkait pemanfaatan dana bantuan yang diberikan, Ibu Sabinah menjelaskan bahwa dana yang ia peroleh digunakan

untuk keperluan sekolah anaknya dan Ia merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan PKH tersebut.

Narasumber terakhir adalah Ibu Solamin. berdasarkan hasil wawancara, terkait penyaluran dana bantuan PK, Ibu Solamin menjelaskan bahwa bantuan yang Ia terima berupa uang tunai dan barang yang diberikan oleh Ibu Mega selaku Ketua PKH. Bu Solamin menjelaskan bahwa uang tunai yang Ia terima sebesar lima ratus hingga satu juta rupiah.

Menurut Purwanto dan Sulistyawati (2015: 76), terdapat empat indikator yang harus dipenuhi dalam proses penyaluran bantuan yaitu waktu penyaluran, kuantitas, kualitas dan tepat sasaran (Purwanto dan Sulistyawati, 2015: 76). Proses penyaluran bantuan dikatakan berhasil apabila keempat indikator tersebut sudah tepat. Pada penelitian ini proses penyaluran bantuan belum dapat dikatakan berhasil karena empat indikator tersebut belum terpenuhi.

3. Proses Pemanfaatan Dana

Tahap ketiga dari implementasi suatu program adalah pemanfaatan dana. Suatu program dikatakan berhasil apabila dana yang diberikan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program tersebut. Ketika ditanya tentang bagaimana dana bantuan

tersebut dimanfaatkan, Bu Mega menjelaskan bahwa dana bantuan tersebut digunakan untuk keperluan sekolah seperti membeli buku, sepatu, tas, membayar iuran-iuran dan lain sebagainya berkaitan dengan keperluan sekolah. Selain itu, khusus untuk ibu hamil, dana bantuan digunakan untuk biaya pemeriksaan Kesehatan, membeli vitamin dan membeli susu. Sementara itu untuk balita digunakan untuk membeli makanan sehat.

Menurut Bu Mega, masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya program PKH ini. Masyarakat kurang mampu dapat membayar keperluan anak-anak mereka yang bersekolah dan mereka dapat mengakses layanan Kesehatan khusus bagi ibu hamil atau nifas. Selain itu dampak positif lainnya adalah tidak ada anak yang putus sekolah karena kendala ekonomi.

Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan Ibu Mulian sebagai salah satu warga penerima bantuan PKH menjelaskan bahwa dana bantuan digunakan untuk biaya anak sekolah. Lebih jauh lagi Bu Mulian mengatakan merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Berikutnya, Ibu Malina mengatakan bahwa dana yang diberikan digunakan untuk

keperluan sekolah anaknya dan Ia merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Ibu Sabinah menjelaskan bahwa dana yang ia peroleh digunakan untuk keperluan sekolah anaknya dan Ia merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan PKH tersebut. Narasumber terakhir, Ibu Solamin menjelaskan bahwa dana bantuan yang ia terima digunakan untuk keperluan anaknya sekolah. Dan Ia mengatakan merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, para penerima menggunakan bantuan untuk keperluan pendidikan anak-anak mereka. Hal tersebut berarti bahwa keempat warga yang menerima bantuan PKH dalam bidang pendidikan.

Pemanfaatan dana adalah dimanfaatkannya bantuan tersebut untuk kegiatan yang menunjang kehidupan utama kelompok sasaran. Kemudian pemanfaatan dana tersebut perlu dibandingkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila pemanfaatan dana tersebut mampu mewujudkan tujuan kebijakan maka kita bisa mengatakan bahwa kinerja implementasi kebijakan tersebut (*policy performance*) tinggi.

Dalam penelitian ini tahap pemanfaatan dana belum dapat dikatakan berhasil karena tidak ditemukannya bukti yang kuat atau dokumen yang mendukung keterangan narasumber yang diwawancarai. Untuk memverifikasi bahwa dana bantuan benar-benar digunakan untuk kebutuhan sekolah diperlukan dokumen atau bukti lain yang valid.

Untuk mencapai tujuan PKH dalam proses pemanfaatan dana tetap harus didampingi. Selain itu warga juga harus diberikan sosialisasi yang tepat agar mereka benar-benar sadar bahwa dana bantuan PKH harus digunakan dengan semestinya sesuai dengan tujuan PKH. Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan guna percepatan pencapaian tujuan program. Pendamping sosial PKH menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendamping sosial PKH juga memastikan KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan untuk perubahan perilaku KPM PKH (Pedoman Pelaksanaan PKH, 2019: 43).

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses sosialisasi Program Keluarga Harapan di Desa Sebatih telah dilakukan sesuai aturan yang terdapat pada buku pedoman PKH 2019.
2. Proses penyaluran dana Program Keluarga Harapan di Desa Sebatih sudah dilakukan tetapi belum dilakukan sesuai aturan yang terdapat pada buku pedoman PKH 2019.
3. Proses pemanfaatan dana Program Keluarga Harapan di Desa Sebatih sudah dilakukan tetapi belum dilakukan sesuai yang terdapat pada buku pedoman PKH 2019. Hanya dilaksanakan 1 bulan sekali.

2. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait implementasi PKH di desa Sebatih adalah:

1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyaluran dana sehingga penyaluran bantuan PKH tepat

waktu dan tepat kuantitasnya. Proses penyaluran dana harus benar-benar sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan 2019.

2. Melakukan pendampingan dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat anggota KPM PKH agar pemanfaatan dana bantuan PKH benar-benar sesuai dengan tujuan PKH.

F. REFERENSI

Sumber Buku :

Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, Bogor.

Moleong, Lexy. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT

Purwanto, E. A & Sulistyastuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya*

diIndonesia. Yogyakarta: Gava Media

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

_____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

_____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi, Kebijaksanaan implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara

Sumber Lain:

www.kemosos.go.id, diakses pada 15 November 2019

Buku Pedoman PKH 2019

Referensi Peraturan:

Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang nomor 13 Tahun 2011

tentang penanganan Fakir Miskin.

Peraturan presiden nomor 15 tahun 2010

tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.